



# **Implikasi Akses TPP pada BUMN: Dampak Ekonomi dan Usulan Strategi Reformasi**

22 November 2016

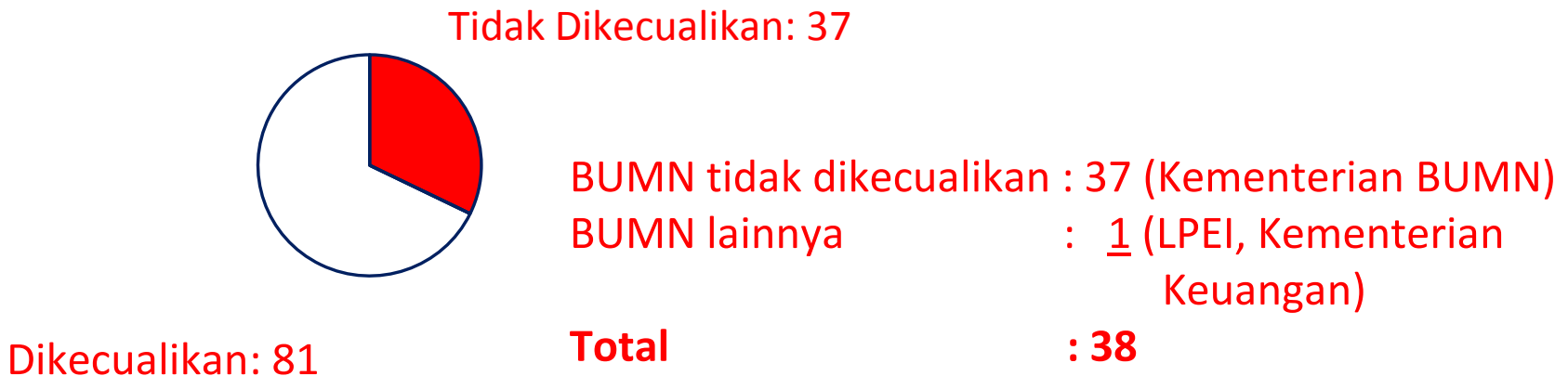
# Dampak TPP terhadap BUMN: Benar atau Salah?

- TPP akan membawa dampak pada sebagian besar BUMN **B/S**
- TPP mewajibkan Pemerintah untuk mengurangi sahamnya di beberapa BUMN **B/S**
- TPP melarang adanya bantuan non-komersil kepada seluruh BUMN yang tercakup ke dalam perjanjian **B/S**
- TPP melarang monopoli pemerintah **B/S**
- TPP akan mensyaratkan perubahan pada *negative list* **B/S**
- TPP akan mensyaratkan perubahan pada Pasal 33 UUD 45 **B/S**

1. BUMN apa saja yang terdampak oleh TPP?
2. Bagaimana TPP membawa dampak pada BUMN?
3. Dampak apa yang tercipta dari Reformasi BUMN yang diwajibkan TPP?
4. Bagaimana mengimplementasikan reformasi BUMN seperti yang diwajibkan TPP?

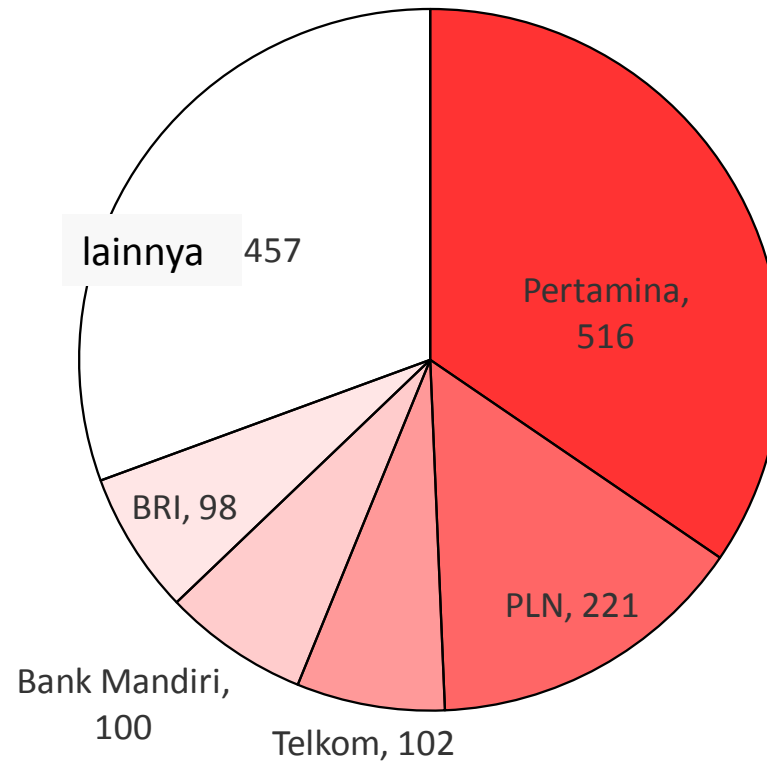
**| BUMN Apa Saja yang Terdampak Oleh  
TPP?**

- **BUMN yang dikendalikan Pemerintah:** > 50% dari modal saham atau wewenang mengangkat > 50% anggota dewan
- **BUMN besar:** pendapatan komersial tahunan > SDR 200 juta (sekitar Rp 3.7 triliun)\*

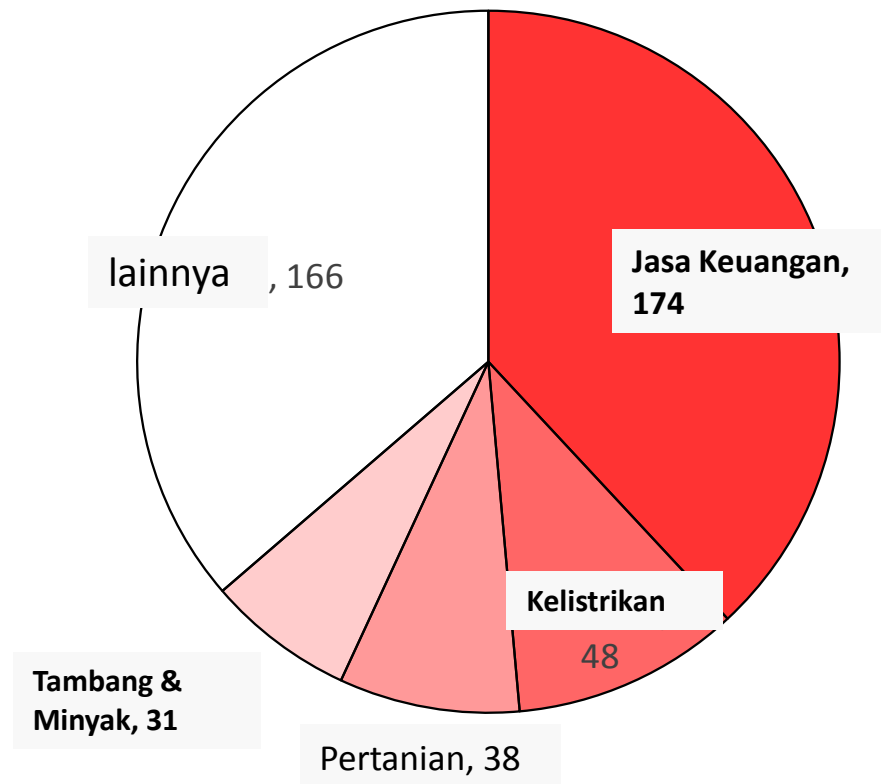


\* Kecuali dana pensiun yang dikelola secara mandiri dan dana kekayaan negara

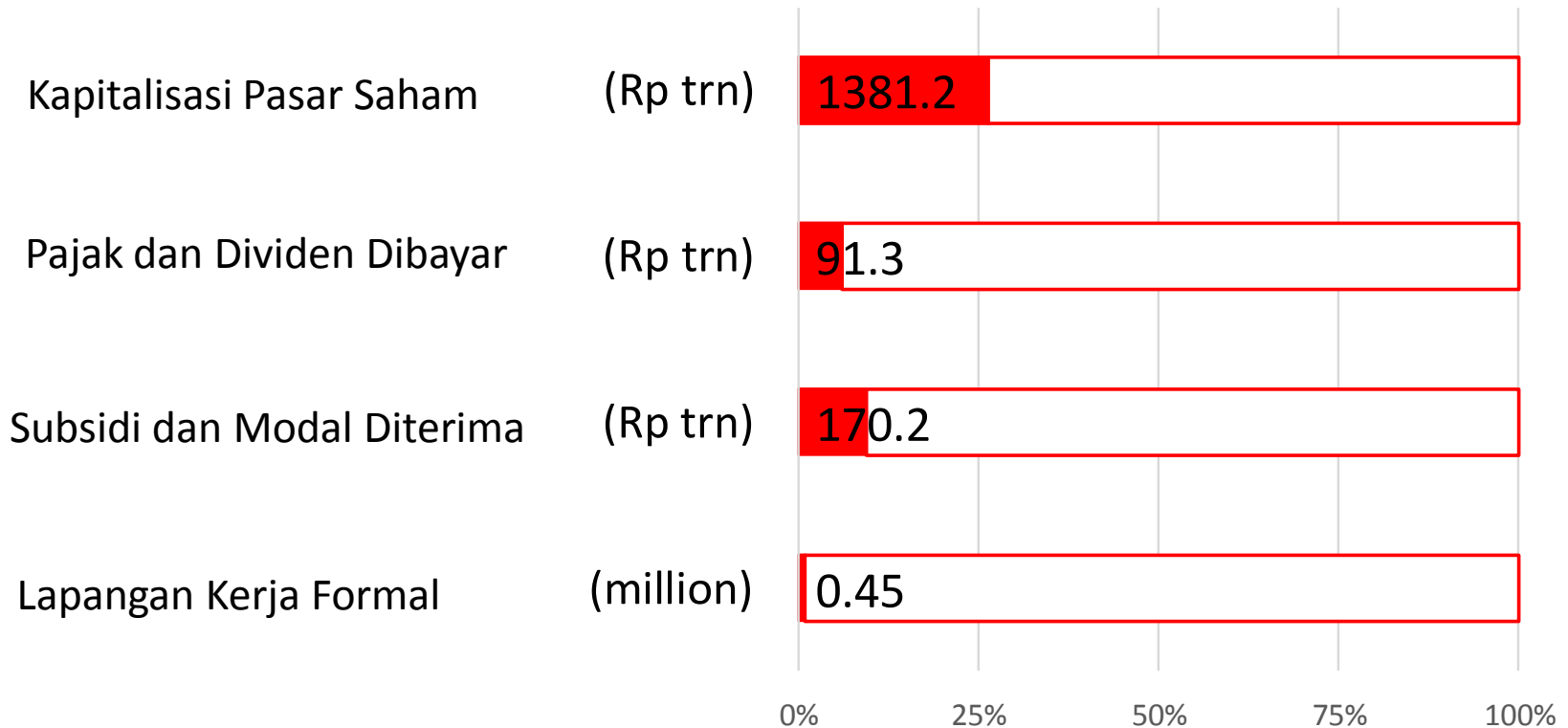
Total Pendapatan Komersial Tahun 2015:  $\approx$  Rp  
1,520 triliun



Jumlah Pekerjaan Tahun 2015:  $\approx$  453,000



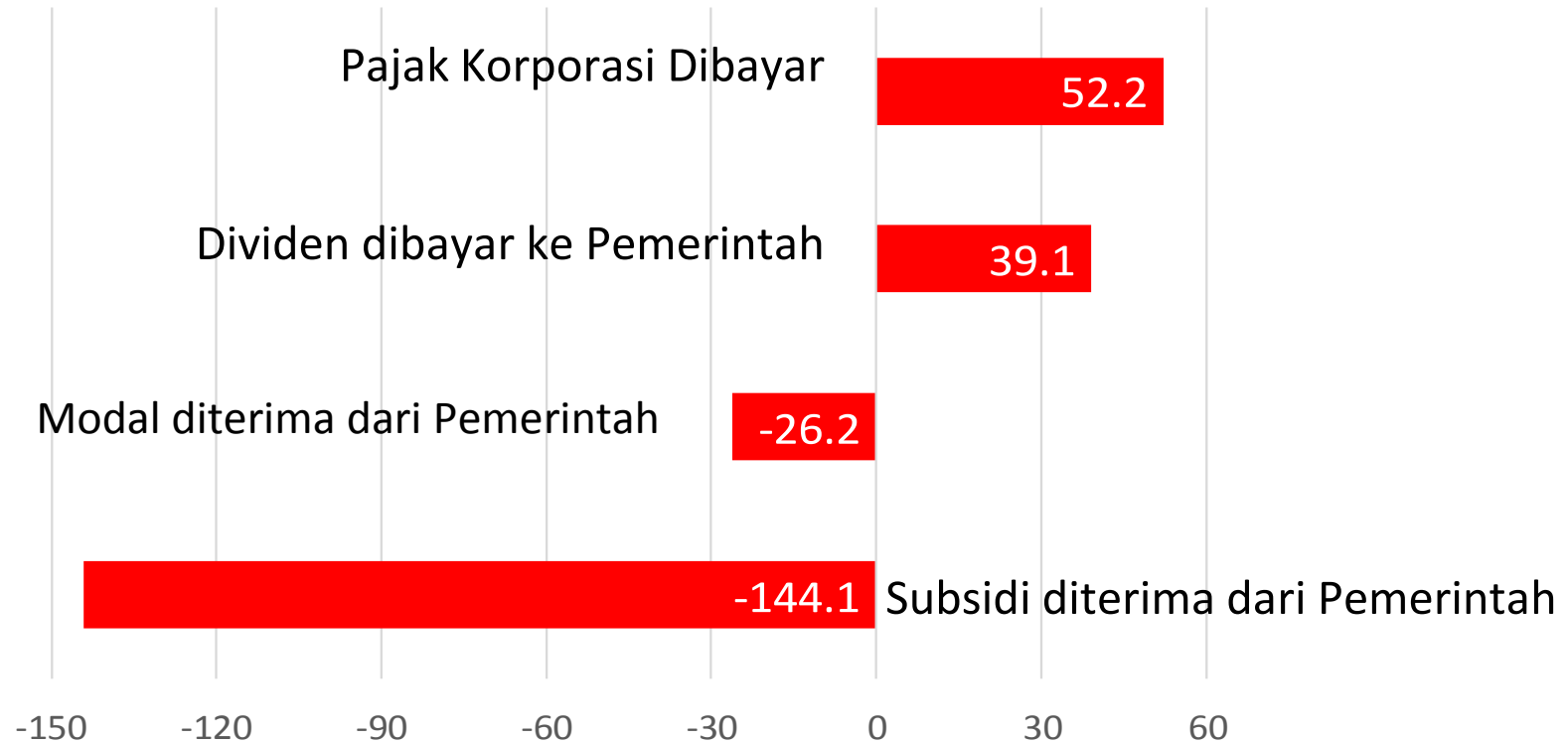
## Persentase Saham dalam Total Nasional (2015)\*



\* Kecuali kapitalisasi pasar saham (2014)



Data yang telah diaudit selama 2015 (Rp trn)



**| Bagaimana TPP membawa dampak pada  
BUMN?**

- Penghapusan tarif atas barang yang dihasilkan dalam wilayah TPP: dampak terbatas, karena sebagian besar BUMN bukan produsen
- Penghapusan hambatan non-tarif dalam wilayah TPP: penghapusan pembatasan masuknya perusahaan asing, penghapusan hak-hak spesial BUMN dalam pasar domestik
- Penghapusan bantuan non-komersial untuk BUMN versus perusahaan lain dalam lingkup TPP: hanya dibolehkan untuk BUMN yang memasok jasa secara eksklusif di Indonesia

## Tujuan Jangka Panjang:

Menciptakan lapangan bermain yang setara bagi semua perusahaan dalam lingkup TPP

# BUMN apa saja yang paling siap terhadap TPP?

## Intensitas Persaingan Domestik

**Eksposur terhadap  
Persaingan Asing**

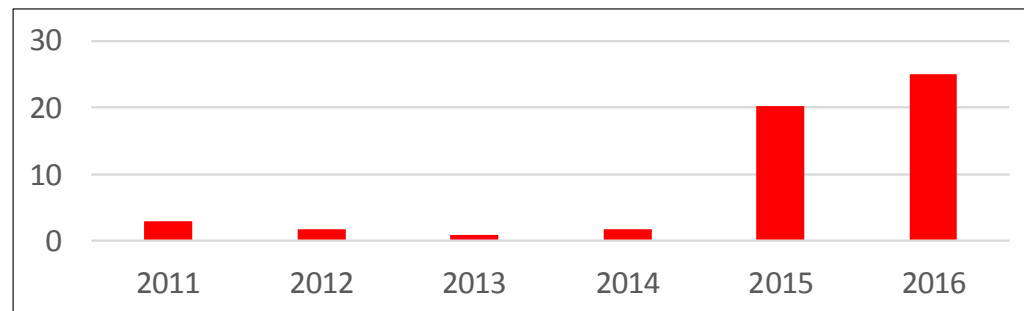
	Rendah	Menengah	Tinggi
Rendah	Operator Pelabuhan Operator Bandara Pertambangan & penggalian Eksplorasi Minyak	-	Perjalanan Udara Ritel
Menengah	Operator KA Operator Jalan Tol	Pertanian Jasa Keuangan Konstruksi	Komunikasi
Tinggi	Pembangkit Listrik Produksi Pupuk	Produksi Semen Produksi Kehutanan Besi dan Baja	Asuransi

Sumber: OECD *Regulatory Restrictions Index* (Eksposur terhadap Persaingan Asing), Analisis AIPEG (intensitas persaingan domestik)

# BUMN apa saja yang mendapat manfaat dari bantuan non-komersil?

- **Bantuan langsung:** pinjaman lunak, hibah, suntikan modal meski jarang, namun PMN semakin tumbuh pesat beberapa tahun belakangan.
- **Bantuan tak langsung:** mengizinkan BUMN mendapat ROI lebih rendah dari yang dibenarkan secara komersial (misal: menerima dividen lebih rendah atau nol), khususnya untuk BUMN terdaftar di pasar modal.

PMN untuk BUMN  
terdampak TPP  
(Rp triliun)

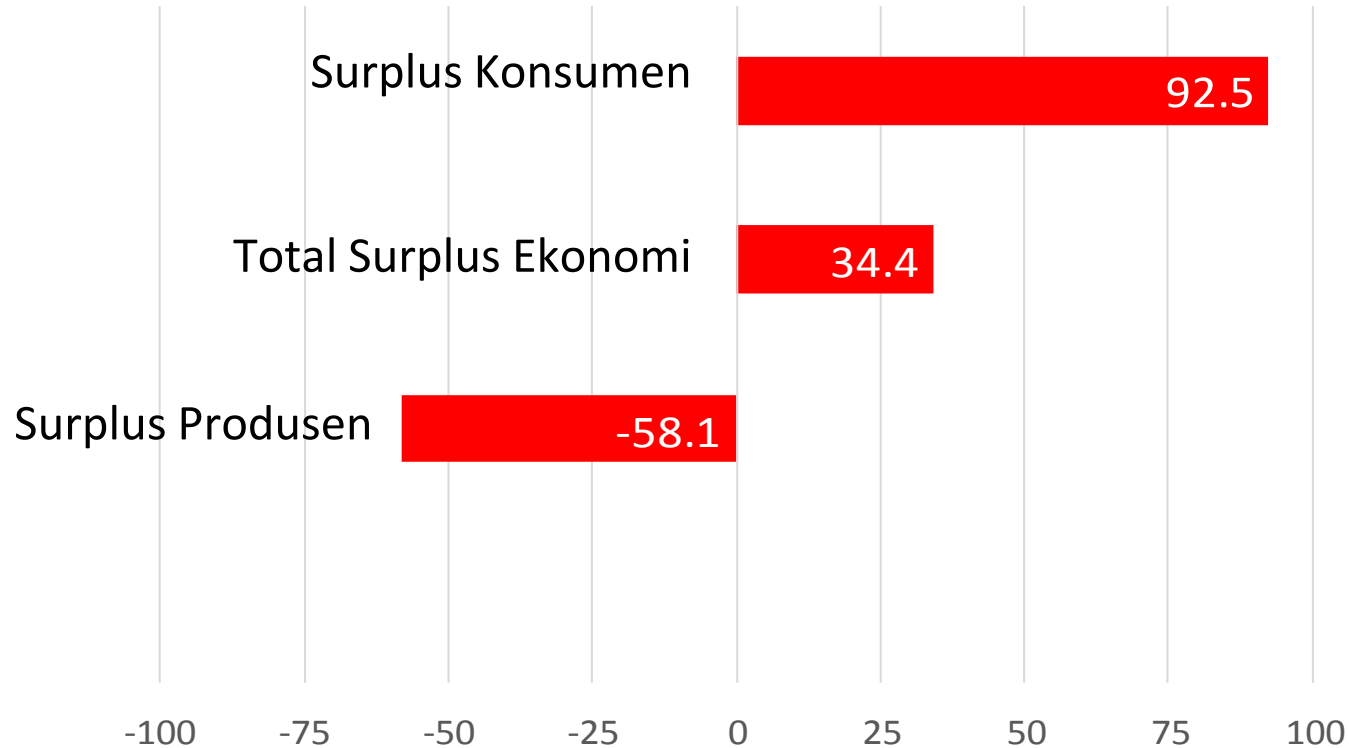


# Kapan TPP mengizinkan bantuan non-komersil untuk BUMN?

	BUMN <u>bukan</u> pemasok jasa	BUMN pemasok jasa
<b>BUMN menjalankan aktivitas komersial di Indonesia <u>dan di negara-negara lain anggota TPP</u></b>	<b>Tidak diizinkan</b> (Contoh: Krakatau Steel, Timah, Perum Perhutani, Aneka Tambang)	<b>Tidak diizinkan</b> (contoh: Garuda)
<b>BUMN hanya menjalankan aktivitas komersial di Indonesia</b>	<b>Tidak diizinkan</b> (Contoh: Kimia Farma, Waskita Karya, Adhi Karya)	<b>Diizinkan</b> (Contoh: PLN, BNI, BRI, Pelindo, Askrindo, Angkasa Pura)
<b>Pengecualian</b>	<b>Diizinkan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bantuan non-diskriminatif (seluruh perusahaan dalam lingkup TPP memiliki akses yang sama)</li><li>- Bantuan sementara untuk restrukturisasi atau likuidasi</li><li>- Bantuan sementara untuk keadaan darurat nasional atau internasional</li><li>- Pengecualian berdasarkan negara (akan dinegosiasikan)</li></ul>	

**Dampak apa yang tercipta dari  
Reformasi BUMN yang diwajibkan TPP?**

## Perkiraan AIPEG selama Tahun 2015 (Rp trn)



Sumber: Analisis AIPEG (berdasarkan sampel 12 BUMN besar di bidang minyak dan gas, utilitas dan perbankan, dengan asumsi 10% penurunan harga dipicu oleh TPP)



## Dampak Positif (+)

## Dampak Negatif (-)

<b>Konsumen Indonesia</b>	Pilihan bertambah, daya beli meningkat karena harga turun: <b>+Rp 97.7 trn</b>	Peluang kerja BUMN dengan BUMN lain berkurang: <b>-Rp 5.4 trn</b>
<b>Pemerintah Indonesia</b>	Peningkatan jumlah dividen dan pajak korporasi yang dibayar oleh non-BUMN: <b>+Rp 4.0 trn</b> Berkurangnya akses ke bantuan non-komersil: <b>+Rp 10.8 trn</b>	Jumlah dividen dan pajak korporasi yang dibayar oleh BUMN menurun: <b>-Rp 6.5 trn</b>
<b>BUMN terdampak</b>	Peningkatan akses BUMN ke pasar-pasar luar negeri dalam zona TPP: <b>nol</b>	Berkurangnya akses ke bantuan non-komersial: <b>-Rp 10.8 trn</b> Laba berkurang: <b>-Rp 8.3 trn</b>
<b>Perusahaan Indonesia lainnya</b>	Laba bersih meningkat karena meningkatnya akses ke pasar domestik yang saat ini dikuasai BUMN: <b>+Rp 3.4 trn</b>	(tidak ada)
<b>Investor</b>	Meningkatnya dividen bersih yang dibayarkan BUMN dan perusahaan selain BUMN: <b>+Rp 5.0 trn</b> (asing +Rp 4.4 trn, Indonesia +Rp 0.6 trn)	(tidak ada)

Sumber: Analisis AIPEG (berdasarkan sampel 12 BUMN besar di bidang minyak dan gas, utilitas dan perbankan, dengan asumsi 10% penurunan harga dipicu oleh TPP)

Dampak neto **tidak terlalu besar**, mengingat:

- **Pangsa pasar BUMN menurun**: para pesaing cenderung lebih efisien dibandingkan BUMN, namun
- **Total pasar meningkat**: persaingan menurunkan harga tetapi meningkatkan total ukuran pasar (contoh: jasa telpon selular, perjalanan udara domestik)

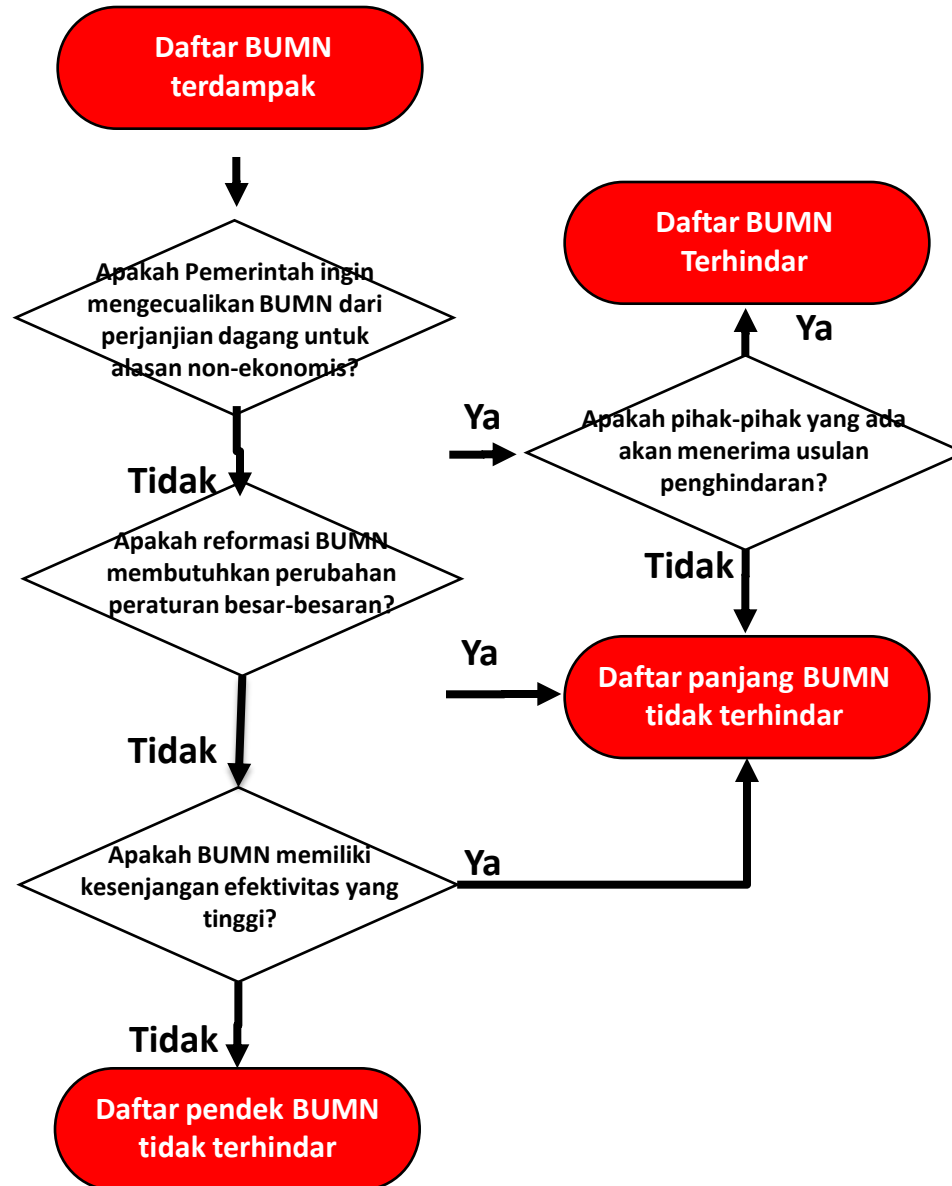
Asumsi Tanggapan BUMN:

- **Penghentian Rekrutmen**: penghentian rekrutment tiga tahun mengurangi staf sebesar 10%
- **Uang pesangon**: diasumsikan sebesar Rp 20 juta/bulan selama setahun

**Bagaimana Mengimplementasikan  
Reformasi BUMN Seperti yang  
Diwajibkan TPP?**

- **Reformasi Hukum:** tergantung pada pengecualian yang diminta Pemerintah (dan yang diterima) dari pihak-pihak untuk perjanjian perdagangan.
- **Reformasi penetapan harga:** harga harus mampu merespon perubahan dalam lingkungan yang kompetitif (regulator harga harus mampu melakukannya)
- **Reformasi BUMN dalam sektor-sektor terpilih sebelum penandatanganan perjanjian dagang:** manfaat ekonomi dari reformasi BUMN yang substansial (juga dalam hal tidak ada perjanjian perdagangan yang disepakati)

# Penentuan Prioritas BUMN Untuk Percepatan Reformasi



Terima Kasih